

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Dri Mahmudi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Stephens, Otis, dan Jr., John Scheb II, 2008, *American Constitutional Law, Volume I: Sources of Power and Restraint*, Thomson Wadsworth, Amerika Serikat.
- Strong, C.F., 1966, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Nusa Media, Bandung.

### B. Artikel Jurnal

- Ajie, Radita, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02, Juni 2016.
- Bisariyadi, "Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, September 2015.
- Dramanda, Wicaksana, "Menggagas Penerapan Judicial Restraint pada Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Jakarta, 2014.
- Dressel, Björn, "Courts and Governance in Asia: Exploring Variations and Effects", *Hong Kong Law Journal*, Vol. 42, 2012.
- Faiz, Muhammad, dan Dian Agung, "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016.
- Faiz, Pan Mohamad, "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016.

- Ferreres, Victor, "The Consequences of Centralizing Constitutional Review in A Special Court. Some Thought On Judicial Activism", *SELA (Seminaro en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política) Papers*, 2004.
- Gardbaum, Stephen, "Are Strong Constitutional Courts Always a Good Thing for New Democracies?" *Columbia Journal of Transnational Law* 285 *UCLA School of Law Research Paper*, No. 15-02, 2015.
- Kavanagh, Aileen, "Judicial Restraint in The Pursuit of Justice", *University of Toronto Law Journal*, Volume 60 Issue 1, musim dingin 2010.
- Kmiec, Keenan D., "The Origin and Current Meanings of Judicial Activism", *California Law Review*, Volume 92 Issue 5, Oktober 2004.
- Kramer, Larry D., "Judicial Restraint and End of Judicial Supremacy", *California Law Review*, Volume 100, 2012.
- Mahfud M. D., Moh., "Rambu Pembatasan dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum*, Nomor 4, Volume 16, Oktober 2009
- Maulidi, Mohammad Agus, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 4, Oktober 2017.
- Nolan, Andrew, "The Doctrine of Constitutional Avoidance: A Legal Overview", *Congressional Research Service*, 2014.
- Omara, Andy, "Interpreting The Indonesian Constitutional Court'S Approach in Conducting Judicial Review in Cases Related to Economic and Social Rights", *Indonesia Law Review*, Volume 7, Number 2, 2017.
- Posner, Richard, "The Rise and Fall of Judicial Self-Restrnt", *California Law Review*, Volume 11 Terbitan ke 3, 2012.
- Posner, Richard, "The Meaning of judicial Self-Restraint", *Indiana Law Jurnal I*, 1983.
- Sumadi, H. Ahmad Fadlil, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam teori dan Praktik", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8 Nomor 6, 2011.
- Talmadge, Philip A., "Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems", *Seattle University Law Review*, Volume 22, 1999.
- Talmadge, Phillip A., "Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems", *Seattle University Law Review* No. 695, 1999.
- Wibowo, Mardian, "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang" *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni, 2015.

### C. Makalah/Tugas Akhir

Layungsari, R.A. Granita Ramadhani Layungasri, 2009, *Analisa Aspek Legalitas Transaksi Efek Short-Selling pada Masas Krisis Keuangan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Wicaksana, Dian Agung, dan Andi Sandi Antonius, 2017, *Menakar Peluang Mendudukkan Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Pembatasan Yudisial Pada Mahkamah Agung*, Penelitian, Unit Riset dan publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

### D. Artikel Internet

Legal Information Institute, “Ashwander v. Tennessee Valley Authority”, <https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/297/288>, diakses tanggal 16 Mei 2019

Mahkamah Konstitusi, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”, <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=5>, diakses tanggal 22 November 2018

Mahkamah Konstitusi, “Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah / Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”, <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=5>, diakses tanggal 22 November 2018

Mahkamah Konstitusi, “Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2009”, <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPU&menu=5>, diakses tanggal 22 November 2018

Mahkamah Konstitusi, “Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara”, <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapSKLN&menu=5>, diakses tanggal 22 November 2018

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi”, <https://mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=PUU&jnsperkara=1>, diakses tanggal 10 Juni 2019.

Perpustakaan Virtual Congress of United States, “Marbury v Madison”, di [www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/marbury.html](http://www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/marbury.html), diakses pada 11 Oktober 2018

## **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187).

## **F. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, tertanggal 26 Maret 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 28 September 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 30 September 2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142-146/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertanggal 8 Februari 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 27 Agustus 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 15 Oktober 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 12 Januari 2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 31 Januari 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 11 Maret 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 8 Agustus 2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 27 maret 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 27 Maret 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 27 Juni 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 17 Oktober 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 7 Mei 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 22 Mei 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 29 September 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 29 September 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 5 November 2014.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XII/2014 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 22 Januari 2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 22 Januari 2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 5 Februari 2015.
- Putusan Mahakamh Konstitusi 85/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 24 Maret 2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 24 Maret 2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 tetang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 22 September 2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 22 September 2015.



- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 22 September 2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 28 Juli 2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 25 Januari 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 7 Februari 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 28 Februari 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 10 Oktober 2017.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 8 Februari 2018.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 8 Februari 2018.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 8 Februari 2018.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 28 Juni 2018.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XVI/2018 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 28 Juni 2018.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 28 Juni 2018.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 28 Juni 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 28 Juni 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 26/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 28 Juni 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 23 Juli 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 23 Juli 2018.